

Peran Pendidikan Anti Korupsi dalam Sistem Pendidikan Indonesia: Kajian Literatur

Bagus Aditya Indrawan^{1*}, Dimas Alen Pranata², I Komang Aris Wahyudi³, Juansyah R⁴

^{1,2,3,4} Program Studi Hukum, Universitas Bandar Lampung, Jl. ZA. Pagar Alam No.26, Labuhan Ratu, Kec. Kedaton, Kota Bandar Lampung, Lampung

E-mail: bagusadityakotabumi@gmail.com

*Corresponding Author



<https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i4.6222>

ARTICLE INFO

Article history:

Received: 29 Apr 2026

Revised: 05 May 2026

Accepted: 11 May 2026

Kata Kunci:

Pendidikan Anti Korupsi, Integritas, Karakter, Kurikulum, Budaya Anti Korupsi.

Keywords:

Anti-Corruption Education, Integrity, Character, Curriculum, Anti-Corruption Culture.



ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran pendidikan anti korupsi dalam sistem pendidikan Indonesia melalui pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur. Pendidikan anti korupsi dipandang sebagai strategi preventif dalam membentuk karakter peserta didik yang berintegritas, jujur, dan bertanggung jawab. Implementasi dilakukan melalui integrasi nilai-nilai anti korupsi ke dalam kurikulum serta proses pembelajaran di berbagai jenjang pendidikan. Hasil kajian menunjukkan bahwa pendidikan anti korupsi mampu meningkatkan kesadaran etika dan perilaku antikoruptif, terutama apabila didukung oleh peran pendidik sebagai teladan dan lingkungan pendidikan yang kondusif. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan pemahaman pendidik, metode pembelajaran yang cenderung teoritis, serta lemahnya evaluasi dan pengawasan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan, peningkatan kompetensi pendidik, serta sinergi antara pemerintah dan lembaga pendidikan agar pendidikan anti korupsi dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan dalam membangun budaya integritas.

This study aims to examine the role of anti-corruption education in the Indonesian education system using a qualitative approach through a literature review method. Anti-corruption education is considered a preventive strategy in shaping students' character, particularly in fostering integrity, honesty, and responsibility. Its implementation is carried out through the integration of anti-corruption values into the curriculum and learning processes across various educational levels. The findings indicate that anti-corruption education can enhance ethical awareness and anti-corruption behavior, especially when supported by the role of educators as role models and a conducive educational environment. However, its implementation still faces several challenges, including limited teacher understanding, overly theoretical teaching methods, and weak evaluation and supervision systems. Therefore, strengthening policies, improving teacher competencies, and enhancing collaboration between the government and educational institutions are necessary to ensure the effectiveness and sustainability of anti-corruption education in building a culture of integrity.



This is an open access article under the CC-BY-SA license.

How to Cite: Bagus Aditya Indrawan, et al. (2026), Peran Pendidikan Anti Korupsi dalam Sistem Pendidikan Indonesia: Kajian Literatur, 4(4). <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i4.6222>

PENDAHULUAN

Korupsi pada dasarnya dipahami sebagai tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki seseorang untuk memperoleh keuntungan pribadi maupun kelompok. Perilaku ini dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti suap, gratifikasi, penggelapan, maupun praktik lain yang merugikan kepentingan publik. Dalam konteks kehidupan bernegara, korupsi tidak hanya berdampak pada kerugian finansial, tetapi juga merusak tatanan sosial, melemahkan kepercayaan masyarakat, serta menghambat terciptanya pemerintahan yang bersih dan berkeadilan. Oleh karena itu, korupsi dipandang sebagai masalah serius yang harus ditangani secara sistematis.

Sementara itu, anti korupsi merujuk pada sikap dan nilai yang menolak serta mencegah terjadinya praktik korupsi dalam berbagai aspek kehidupan. Konsep ini menekankan pentingnya integritas, kejujuran, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap kepentingan bersama. Pendidikan dan pembiasaan nilai-nilai tersebut menjadi kunci dalam membentuk individu yang berkarakter kuat dan tidak mudah tergoda untuk melakukan korupsi. Dengan demikian, anti korupsi tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga preventif melalui pembentukan moral dan etika sejak dini.¹

Permasalahan dalam penelitian ini berfokus pada belum optimalnya implementasi pendidikan anti korupsi dalam sistem pendidikan Indonesia. Meskipun pendidikan anti korupsi telah dianggap sebagai langkah strategis dalam mencegah korupsi sejak dini, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala, seperti integrasi kurikulum yang belum merata, metode pembelajaran yang cenderung teoritis, serta kurangnya kesiapan tenaga pendidik dalam menanamkan nilai-nilai integritas. Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman peserta didik terhadap nilai anti korupsi masih belum sepenuhnya terbentuk secara menyeluruh, sehingga berdampak pada belum maksimalnya perubahan sikap dan perilaku antikoruptif dalam kehidupan sehari-hari.²

Penelitian yang dilakukan oleh Sutrisno dan Murdiono dengan judul “Pengembangan Modul Pendidikan Anti Korupsi pada Mata Pelajaran PPKn untuk SMA”, yang hasilnya menunjukkan bahwa penggunaan modul pendidikan anti korupsi terbukti efektif dalam meningkatkan hasil belajar sekaligus sikap antikorupsi peserta didik. Penelitian ini menekankan pentingnya inovasi media dan bahan ajar dalam mendukung keberhasilan implementasi pendidikan anti korupsi di sekolah.³

Seperti penelitian yang dilakukan oleh Murdiono dengan judul “Pendidikan Anti Korupsi Terintegrasi dalam Pembelajaran PKn untuk Menanamkan Karakter Kejujuran di SMP”, yang hasilnya menunjukkan bahwa integrasi nilai-nilai anti korupsi dalam pembelajaran mampu menanamkan karakter kejujuran pada siswa, meskipun masih terdapat kendala seperti keterbatasan waktu dan kesulitan dalam menentukan metode pembelajaran yang tepat. Penelitian ini mengindikasikan bahwa keberhasilan pendidikan anti korupsi sangat bergantung pada strategi pengajaran yang digunakan oleh pendidik.⁴

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis peran pendidikan anti korupsi dalam sistem pendidikan Indonesia, khususnya dalam membentuk karakter dan integritas peserta didik. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi strategi implementasi yang efektif serta berbagai faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan pendidikan anti korupsi di lembaga pendidikan. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan model pendidikan anti korupsi yang lebih efektif, kontekstual, dan mampu membentuk generasi yang memiliki kesadaran serta komitmen tinggi terhadap nilai-nilai kejujuran dan anti korupsi.⁵

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (library research). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam peran pendidikan antikorupsi dalam sistem pendidikan Indonesia berdasarkan berbagai sumber ilmiah yang

¹ Zeni Zaenal Mutaqin, *Pengertian Dasar Antikorupsi Dan Integritas*, 2020.

² Magdalena Isus and Didik Iswahyudi, “Implementasi Nilai-Nilai Anti Korupsi Melalui Pembelajaran Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Di SMP PGRI 6,” *Jiip (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan)* 8, no. 8 (2025), <https://jiip.stkipyapisdompnu.ac.id/jiip/index.php/JIIP/article/view/8487/6116>.

³ Mukhamad Murdiono Sutrisno, “Pengembangan Modul Pendidikan Anti Korupsi Pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Untuk Kelas X Sekolah Menengah Atas,” *Jurnal Pendidikan IPS* 4, no. 1 (2017): 55–66.

⁴ Pendidikan Kewarganegaraan, “Pendidikan Anti Korupsi Terintegrasi Dalam Pembelajaran PKn Untuk Menanamkan Karakter Kejujuran Di SMP,” *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial* 15, no. 1 (2016): 1–12.

⁵ Herry Widyastono and Balitbang Kemdikbud, “Strategi Implementasi Pendidikan Anti Korupsi Di Sekolah Implementation Strategy Of Anti-Corruption,” *Jurnal Teknodik* 17, no. 1 (2013): 194–208, <https://jurnalteknodik.kemendikdasmen.go.id/index.php/jurnalteknodik/en/article/view/79/79>.

relevan. Metode ini menekankan pada penafsiran data deskriptif berupa teori, konsep, dan hasil penelitian sebelumnya tanpa menggunakan perhitungan statistik.⁶

Data dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber sekunder, seperti jurnal ilmiah nasional, artikel penelitian, buku, serta publikasi resmi yang membahas pendidikan antikorupsi dan implementasinya di Indonesia. Proses pengumpulan data dilakukan dengan teknik dokumentasi, yaitu menelusuri, mengumpulkan, dan menyeleksi literatur yang sesuai dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan teknik analisis isi (content analysis) untuk mengidentifikasi pola, konsep, serta temuan terkait peran pendidikan antikorupsi dalam membentuk karakter integritas peserta didik.⁷ Data yang dihimpun merupakan data sekunder yang hanya berasal dari artikel jurnal terkait di basis data Google Scholar yang telah dibuat oleh peneliti-peneliti sebelumnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran pendidikan anti korupsi sebagai strategi preventif pembentukan integritas

Pendidikan anti korupsi memiliki peran strategis sebagai langkah preventif dalam membentuk karakter peserta didik yang berintegritas, jujur, dan bertanggung jawab. Berbagai kajian literatur menunjukkan bahwa korupsi tidak hanya dapat diberantas melalui pendekatan hukum, tetapi juga harus dimulai dari sektor pendidikan sebagai upaya jangka panjang. Pendidikan anti korupsi dipandang sebagai instrumen penting dalam membangun kesadaran sejak dini agar generasi muda tidak terlibat dalam perilaku koruptif di masa depan. Hal ini sejalan dengan temuan bahwa pendidikan anti korupsi merupakan solusi preventif yang harus dilakukan sejak dini untuk membentuk nilai integritas dalam masyarakat.⁸ Selain itu, pendidikan juga berfungsi membentuk karakter antikorupsi melalui integrasi nilai moral dalam proses pembelajaran yang berkesinambungan.⁹ Dalam berbagai studi, pendidikan anti korupsi juga terbukti efektif dalam meningkatkan kesadaran etika dan perilaku sosial peserta didik, sehingga dapat menjadi dasar pembentukan budaya anti korupsi di lingkungan sekolah maupun perguruan tinggi.¹⁰ Bahkan, keterlibatan siswa dan mahasiswa sebagai agen perubahan menunjukkan bahwa pendidikan memiliki dampak jangka panjang dalam menciptakan masyarakat yang lebih bersih dari praktik korupsi.¹¹ Dengan demikian, pendidikan anti korupsi tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga aplikatif dalam membangun sistem nilai yang kuat di lingkungan pendidikan Indonesia.

Integrasi nilai anti korupsi dalam kurikulum dan proses pembelajaran

Implementasi pendidikan anti korupsi dalam sistem pendidikan Indonesia dilakukan melalui integrasi nilai-nilai seperti kejujuran, disiplin, tanggung jawab, dan transparansi ke dalam kurikulum pembelajaran. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pendidikan anti korupsi tidak berdiri sebagai mata pelajaran terpisah, tetapi disisipkan dalam berbagai mata pelajaran seperti PPKn, etika profesi, dan kegiatan pengembangan diri siswa. Integrasi ini bertujuan agar nilai anti korupsi dapat dipahami dan dipraktikkan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari peserta didik. Studi literatur menunjukkan bahwa penyisipan nilai anti korupsi dapat dilakukan melalui kegiatan akademik dan nonakademik dalam

⁶ Lupia Afifi Ilham Huda, Mia Hermanita Syaputri, Jessy Amelya Hulfa, Rosita, Najwa Sayyid Safitra, "Studi Literatur: Menilik Pendidikan Anti Korupsi Di Indonesia," *Jurnal Pendidikan Dan Pengajaran* 1206 (2024): 94–103, <https://jurnal.kolibi.org/index.php/cendikia/article/view/4297/4087>.

⁷ Aida Ratna Zulaiha, "Integritas : Jurnal Antikorupsi Philosophy of Ontology , Epistemology and Axiology of Anti-Corruption Education," *Jurnal Antikorupsi* 11, no. 1 (2025): 109–30, <https://jurnal.kpk.go.id/integritas/article/view/1425/301>.

⁸ Edo Arya Prabowo and Muhammad Guntur, "Urgensi Pendidikan Antikorupsi Di Indonesia : Sebuah Kajian Literatur Tentang Urgensi Dan Pentingnya Nilai Integritas," *Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1, no. 2 (2024): 193–202, <https://journal.appihi.or.id/index.php/Demokrasi/article/view/195/220>.

⁹ ilham Huda, Mia Hermanita Syaputri, Jessy Amelya Hulfa, Rosita, Najwa Sayyid Safitra, "Studi Literatur: Menilik Pendidikan Anti Korupsi Di Indonesia." "

¹⁰ Ni Komang and Ayu Sintia, "Implementasi Pembentukan Karakter Dan Integritas Mahasiswa Melalui Pak (Pendidikan Anti Korupsi)," *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis* 3 (2023): 45–57, File:///C:/Users/Acer/Downloads/Dewamangku,+5.+45-60+Ni+Komang+Ayu+Sintia.Pdf.

¹¹ Siti Fadilahtul Hidayah and Aos Kuswandi, "Implementasi Kebijakan Pendidikan Anti Korupsi Di Perguruan Tinggi Studi Deskriptif Di Universitas Islam 45 Bekasi," *Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Humaniora* 1 (2024): 36–48, <https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/transgenera/article/view/3755/1896>.

lingkungan Pendidikan.¹² Selain itu, implementasi kurikulum juga memperlihatkan bahwa perguruan tinggi telah mulai mengintegrasikan nilai integritas dalam pembelajaran, khususnya melalui mata kuliah kewarganegaraan dan etika profesi.¹³ Dalam konteks pendidikan dasar dan menengah, integrasi ini juga didukung oleh regulasi yang mendorong penerapan pendidikan anti korupsi secara sistematis di sekolah.¹⁴ Dengan demikian, integrasi nilai anti korupsi dalam kurikulum menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa pendidikan tidak hanya berorientasi pada pengetahuan, tetapi juga pembentukan karakter peserta didik yang berintegritas.

Peran dosen dan lingkungan perguruan tinggi dalam internalisasi nilai anti korupsi

Di tingkat perguruan tinggi, peran dosen menjadi sangat penting dalam proses internalisasi nilai-nilai anti korupsi kepada mahasiswa. Dosen tidak hanya berfungsi sebagai pengajar yang menyampaikan materi akademik, tetapi juga sebagai role model yang mencerminkan sikap integritas, kejujuran, tanggung jawab, dan profesionalisme. Dalam konteks pendidikan tinggi, keteladanan dosen menjadi faktor utama yang memengaruhi pembentukan karakter mahasiswa, terutama dalam membangun kesadaran etika akademik seperti kejujuran dalam penulisan tugas, ujian, serta penelitian. Berbagai kajian menunjukkan bahwa pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi akan lebih efektif apabila dosen mampu mengintegrasikan nilai integritas dalam proses pembelajaran secara konsisten dan aplikatif.¹⁵ Selain itu, dosen juga berperan dalam menciptakan ruang diskusi kritis yang mendorong mahasiswa memahami dampak korupsi terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan hukum..

Lingkungan perguruan tinggi juga memiliki peran penting dalam membentuk budaya anti korupsi yang berkelanjutan. Budaya akademik yang menjunjung tinggi kejujuran ilmiah, seperti larangan plagiarisme, transparansi penilaian, dan etika penelitian, menjadi bagian dari implementasi nyata pendidikan anti korupsi. Penelitian menunjukkan bahwa lingkungan akademik yang memiliki sistem pengawasan dan kode etik yang kuat dapat meningkatkan kesadaran mahasiswa terhadap pentingnya integritas.¹⁶ Selain itu, kegiatan kemahasiswaan seperti organisasi, seminar, dan pelatihan kepemimpinan juga dapat menjadi sarana penguatan nilai anti korupsi secara praktis.

Dengan demikian, dosen dan lingkungan perguruan tinggi memiliki peran yang saling melengkapi dalam proses internalisasi nilai anti korupsi. Kombinasi antara keteladanan dosen dan budaya akademik yang sehat akan membentuk mahasiswa sebagai generasi intelektual yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki integritas tinggi serta mampu menjadi agen perubahan dalam upaya pemberantasan korupsi di masyarakat.

Tantangan implementasi pendidikan anti korupsi di Indonesia

Implementasi pendidikan anti korupsi di Indonesia masih menghadapi tantangan yang cukup kompleks dan bersifat multidimensional, baik pada tingkat kebijakan, institusi pendidikan, maupun budaya masyarakat. Salah satu tantangan utama adalah belum optimalnya pemahaman pendidik mengenai konsep pendidikan anti korupsi itu sendiri. Banyak guru dan dosen yang masih memandang pendidikan anti korupsi hanya sebagai materi tambahan, bukan sebagai nilai yang harus diintegrasikan dalam seluruh proses pembelajaran. Hal ini menyebabkan implementasinya menjadi kurang sistematis dan cenderung bersifat formalitas. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan pemahaman

¹² Zulaiha, "Integritas: Jurnal Antikorupsi Philosophy of Ontology , Epistemology and Axiology of Anti-Corruption Education."

¹³ Iwan Ridwan Paturochman, "Integrasi Pendidikan Anti-Korupsi Dalam Kurikulum Akuntansi : Kajian Terhadap Efektivitas Dan Tantangannya," *Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia* 3, no. 2 (2026): 30–35, <https://jurnalisticqomah.org/index.php/jppi/article/view/6217/4158>.

¹⁴ Rusman Aida Ratna Zulaiha, Dadang Sukirman, "Analisis Implementasi Regulasi Pendidikan Antikorupsi Pada Pendidikan Dasar Dan Menengah," *Jurnal Riset Dan Konseptual* 10, no. 2 (2025): 312–22, <https://jurnal.unublitar.ac.id/index.php/briliant/article/view/2166/882>.

¹⁵ Muhammad Ilham et al., "Implementasi Pendidikan Anti Korupsi Pada Program Studi Pgmi Iain Kendari The Implementation Of Anti-Corruption Education" 7, no. 1 (2020): 20–31, <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/auladuna/article/view/13704/pdf>.

¹⁶ Komang and Sintia, "Implementasi Pembentukan Karakter Dan Integritas Mahasiswa Melalui Pak (Pendidikan Anti Korupsi)."

ini berdampak pada rendahnya efektivitas internalisasi nilai integritas dalam proses pembelajaran di sekolah maupun perguruan tinggi.¹⁷

Tantangan lainnya adalah keterbatasan pelatihan dan pengembangan kompetensi pendidik dalam mengintegrasikan nilai anti korupsi ke dalam kurikulum. Banyak tenaga pendidik belum mendapatkan pelatihan khusus yang memadai terkait strategi pembelajaran berbasis pendidikan karakter dan integritas. Akibatnya, implementasi pendidikan anti korupsi sering kali tidak konsisten antara satu institusi dengan institusi lainnya. Selain itu, belum adanya panduan operasional yang seragam juga memperkuat ketimpangan dalam pelaksanaan pendidikan anti korupsi di berbagai jenjang pendidikan.

Selain itu, tantangan lain adalah keterbatasan pelatihan dan pengembangan kompetensi pendidik dalam menerapkan pendidikan anti korupsi. Banyak tenaga pendidik belum mendapatkan pelatihan yang memadai mengenai strategi integrasi nilai karakter dalam pembelajaran. Akibatnya, penerapan pendidikan anti korupsi di berbagai lembaga pendidikan menjadi tidak seragam dan kurang sistematis. Beberapa studi juga menegaskan bahwa implementasi di lapangan masih bervariasi antar sekolah dan perguruan tinggi karena belum adanya panduan operasional yang baku.¹⁸

Terakhir, lemahnya sistem evaluasi dan pengawasan juga menjadi kendala dalam memastikan keberhasilan program pendidikan anti korupsi. Tanpa evaluasi yang jelas, implementasi sulit diukur secara objektif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, pelatihan pendidik, serta sinergi antara pemerintah dan lembaga pendidikan agar pendidikan anti korupsi dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.

Efektivitas pendidikan anti korupsi dalam membangun budaya integritas di lingkungan pendidikan

Efektivitas pendidikan anti korupsi dalam membangun budaya integritas di lingkungan pendidikan tidak hanya diukur dari aspek pengetahuan yang dimiliki peserta didik, tetapi juga dari perubahan sikap dan perilaku yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pendidikan anti korupsi mampu meningkatkan kesadaran etika serta membentuk karakter jujur, disiplin, dan bertanggung jawab apabila diimplementasikan secara konsisten dan kontekstual. Pendidikan ini berperan sebagai fondasi dalam menciptakan budaya integritas melalui proses internalisasi nilai yang mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik peserta didik.¹⁹ Selain itu, studi lain menunjukkan bahwa pendidikan anti korupsi yang dilakukan melalui metode interaktif seperti diskusi, simulasi kasus, dan pembelajaran berbasis pengalaman terbukti lebih efektif dalam meningkatkan pemahaman serta mendorong mahasiswa untuk menerapkan nilai integritas dalam kehidupan nyata.²⁰

Namun demikian, efektivitas tersebut masih menghadapi kendala karena dalam praktiknya pendidikan anti korupsi sering kali masih bersifat teoritis dan belum sepenuhnya mampu menginternalisasi nilai kejujuran secara mendalam pada peserta didik. Penelitian menunjukkan bahwa lingkungan akademik yang belum sepenuhnya mendukung nilai integritas menjadi salah satu faktor penghambat utama. Di sisi lain, pendidikan karakter berbasis anti korupsi terbukti memiliki dampak positif terhadap peningkatan kejujuran dan tanggung jawab peserta didik, sehingga berkontribusi pada terbentuknya budaya integritas di lingkungan Pendidikan. Dengan demikian, efektivitas pendidikan anti korupsi sangat bergantung pada konsistensi implementasi, metode pembelajaran yang inovatif, serta dukungan lingkungan pendidikan yang kondusif dalam menanamkan nilai integritas secara berkelanjutan.

Peran kebijakan pemerintah dalam penguatan pendidikan anti korupsi

Kebijakan pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam memperkuat implementasi pendidikan anti korupsi di Indonesia, terutama melalui integrasi nilai-nilai anti korupsi dalam sistem pendidikan nasional. Pemerintah tidak hanya berperan sebagai regulator, tetapi juga sebagai fasilitator

¹⁷ widyastono And Kemdikbud, "Strategi Implementasi Pendidikan Anti Korupsi Di Sekolah Implementation Strategy Of Anti-Corruption."

¹⁸ Aida Ratna Zulaiha, Dadang Sukirman, "Analisis Implementasi Regulasi Pendidikan Antikorupsi Pada Pendidikan Dasar Dan Menengah."

¹⁹ Zainudin Hasan Abdullah Kamalsyah, "Peran Pendidikan Anti Korupsi Dalam Membentuk Generasi Berintegritas Di Indonesia," *Journal of Social and Communication* 1 (2025): 45–59, <https://journal.terekamjejak.com/index.php/jsc/article/view/370/194>.

²⁰ Nindi Merliana Mita et al., "Peran Pendidikan Anti Korupsi Dalam Membangun Integritas Generasi Muda Indonesia," *Journal of the Research Center for Digital Democracy* 1 (2025): 6–11, <https://journal.idede.org/index.php/IDEDE/article/view/139>.

dalam menyediakan kerangka kebijakan, kurikulum, serta program pendukung yang mendorong internalisasi nilai integritas di lembaga pendidikan. Studi menunjukkan bahwa integrasi kebijakan pendidikan anti korupsi dengan pendidikan karakter memiliki kesamaan tujuan, yaitu membentuk peserta didik yang berintegritas melalui pendekatan kognitif, afektif, dan psikomotorik.²¹ Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah berfungsi sebagai fondasi dalam memastikan pendidikan anti korupsi dapat diterapkan secara sistematis dan berkelanjutan di berbagai jenjang pendidikan.

Selain itu, peran pemerintah juga terlihat melalui kerja sama dengan berbagai lembaga, seperti penyediaan modul pendidikan anti korupsi, pelatihan tenaga pendidik, serta penguatan budaya integritas di lingkungan pendidikan. Dukungan kebijakan ini sangat penting mengingat pendidikan anti korupsi merupakan strategi jangka panjang dalam mencegah korupsi melalui pembentukan karakter generasi muda. Namun demikian, penelitian juga menunjukkan bahwa masih terdapat tantangan dalam implementasi kebijakan, seperti belum optimalnya koordinasi antar lembaga serta lemahnya pengawasan dalam pelaksanaan program pendidikan anti korupsi di lapangan.²² Oleh karena itu, diperlukan komitmen yang kuat dari pemerintah untuk tidak hanya merumuskan kebijakan, tetapi juga memastikan implementasi yang efektif melalui evaluasi berkelanjutan, peningkatan kapasitas pendidik, serta penguatan sinergi antara pemerintah, institusi pendidikan, dan masyarakat dalam membangun budaya anti korupsi di Indonesia.

SIMPULAN

Pendidikan anti korupsi memiliki peran penting sebagai strategi preventif dalam membentuk karakter peserta didik yang berintegritas, jujur, dan bertanggung jawab. Melalui integrasi nilai-nilai anti korupsi ke dalam kurikulum dan proses pembelajaran, pendidikan tidak hanya berfungsi mentransfer pengetahuan, tetapi juga menanamkan sikap dan perilaku antikoruptif dalam kehidupan sehari-hari. Peran pendidik dan lingkungan pendidikan menjadi faktor kunci dalam keberhasilan internalisasi nilai tersebut. Namun, implementasinya di Indonesia masih belum optimal karena berbagai kendala, seperti metode pembelajaran yang masih teoritis, keterbatasan kompetensi pendidik, serta kurangnya evaluasi dan pengawasan yang sistematis.

REFERENSI

- Abdullah Kamalsyah, Zainudin Hasan. "Peran Pendidikan Anti Korupsi Dalam Membentuk Generasi Berintegritas Di Indonesia." *Journal of Social and Communication* 1 (2025): 45–59. <https://journal.terekamjejak.com/index.php/jsc/article/view/370/194>.
- Aida Ratna Zulaiha, Dadang Sukirman, Rusman. "Analisis Implementasi Regulasi Pendidikan Antikorupsi Pada Pendidikan Dasar Dan Menengah." *Jurnal Riset Dan Konseptual* 10, no. 2 (2025): 312–22. <https://jurnal.unublitar.ac.id/index.php/briliant/article/view/2166/882>.
- Hidayah, Siti Fadilahtul, and Aos Kuswandi. "Implementasi Kebijakan Pendidikan Anti Korupsi Di Perguruan Tinggi Studi Deskriptif Di Universitas Islam 45 Bekasi." *Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Humaniora* 1 (2024): 36–48. <https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/transgenera/article/view/3755/1896>.
- Ilham Huda, Mia Hermanita Syaputri, Jessy Amelya Hulfa, Rosita, Najwa Sayyid Safitra, Lupia Afifi. "Studi Literatur: Menilik Pendidikan Anti Korupsi Di Indonesia." *Jurnal Pendidikan Dan Pengajaran* 1206 (2024): 94–103. <https://jurnal.kolibi.org/index.php/cendikia/article/view/4297/4087>.
- Ilham, Muhammad, Waode Eti Hardiyanti, Fakultas Ilmu, Pendidikan Universitas, Negeri Gorontalo, and Baruga Kendari. "Implementasi Pendidikan Anti Korupsi Pada Program Studi Pgmi Iain Kendari The Implementation Of Anti-Corruption Education" 7, no. 1 (2020): 20–31.

²¹ Niniek Yuliani and Azis Muslim, "Integrasi Kebijakan Pendidikan Antikorupsi Dengan Kebijakan Pendidikan Karakter," *Jurnal Ilmu Administrasi Publik UMA* 12, no. 2 (2024): 143–55, <https://ojs.uma.ac.id/index.php/publikauma/article/view/12291>.

²² Sidik Permana and Mursyid Setiawan, "Integritas : Jurnal Antikorupsi Korupsi Sektor Pendidikan Di Indonesia : Realitas , Penyebab , Dan Solusi," *Jurnal Antikorupsi* 10, no. 2 (2024): 249–68, <https://jurnal.kpk.go.id/integritas/article/view/1326/287>.

- <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/auladuna/article/view/13704/pdf>.
- Isus, Magdalena, and Didik Iswahyudi. "Implementasi Nilai-Nilai Anti Korupsi Melalui Pembelajaran Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Di SMP PGRI 6." *JIIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan)* 8, no. 8 (2025).
<https://jiip.stkipyapisdompnu.ac.id/jiip/index.php/JIIP/article/view/8487/6116>.
- Kewarganegaraan, Pendidikan. "Pendidikan Anti Korupsi Terintegrasi Dalam Pembelajaran PKn Untuk Menanamkan Karakter Kejujuran Di SMP." *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial* 15, no. 1 (2016): 1–12.
- Komang, Ni, and Ayu Sintia. "Implementasi Pembentukan Karakter Dan Integritas Mahasiswa Melalui Pak (Pendidikan Anti Korupsi)." *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis* 3 (2023): 45–57.
<file:///C:/Users/acer/Downloads/dewamangku,+5.+45-60+Ni+Komang+Ayu+Sintia.pdf>.
- Mita, Nindi Merliana, Lapina Lia, Ayu Fadillah, M Izul Haq Sugandi, and Ita Rosita Wahyiah. "Peran Pendidikan Anti Korupsi Dalam Membangun Integritas Generasi Muda Indonesia." *Journal of the Research Center for Digital Democracy* 1 (2025): 6–11.
<https://journal.idede.org/index.php/IDEDE/article/view/139>.
- Mutaqin, Zeni Zaenal. *Pengertian Dasar Antikorupsi Dan Integritas*, 2020.
- Paturochman, Iwan Ridwan. "Integrasi Pendidikan Anti-Korupsi Dalam Kurikulum Akuntansi : Kajian Terhadap Efektivitas Dan Tantangannya." *Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia* 3, no. 2 (2026): 30–35. <https://jurnalisticomah.org/index.php/jppi/article/view/6217/4158>.
- Permana, Sidik, and Mursyid Setiawan. "Integritas : Jurnal Antikorupsi Korupsi Sektor Pendidikan Di Indonesia : Realitas , Penyebab , Dan Solusi." *Jurnal Antikorupsi* 10, no. 2 (2024): 249–68.
<https://jurnal.kpk.go.id/integritas/article/view/1326/287>.
- Prabowo, Edo Arya, and Muhammad Guntur. "Urgensi Pendidikan Antikorupsi Di Indonesia : Sebuah Kajian Literatur Tentang Urgensi Dan Pentingnya Nilai Integritas." *Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1, no. 2 (2024): 193–202.
<https://journal.appihi.or.id/index.php/Demokrasi/article/view/195/220>.
- Sutrisno, Mukhamad Murdiono. "Pengembangan Modul Pendidikan Anti Korupsi Pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Untuk Kelas X Sekolah Menengah Atas." *Jurnal Pendidikan IPS* 4, no. 1 (2017): 55–66.
- Widyastono, Herry, and Balitbang Kemdikbud. "Strategi Implementasi Pendidikan Anti Korupsi Di Sekolah Implementation Strategy Of Anti-Corruption." *Jurnal Teknodik* 17, no. 1 (2013): 194–208.
<https://jurnalteknodik.kemendikdasmen.go.id/index.php/jurnalteknodik/en/article/view/79/79>.
- Yuliani, Niniek, and Azis Muslim. "Integrasi Kebijakan Pendidikan Antikorupsi Dengan Kebijakan Pendidikan Karakter." *Jurnal Ilmu Administrasi Publik UMA* 12, no. 2 (2024): 143–55.
<https://ojs.uma.ac.id/index.php/publikauma/article/view/12291>.
- Zulaiha, Aida Ratna. "Integritas : Jurnal Antikorupsi Philosophy of Ontology , Epistemology and Axiology of Anti-Corruption Education." *Jurnal Antikorupsi* 11, no. 1 (2025): 109–30.
<https://jurnal.kpk.go.id/integritas/article/view/1425/301>.